

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL
BELI PETASAN YANG MENGANDUNG BAHAN PELEDAK**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

Devi Agustin
NPM: 1521030037

Program Studi: Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440H / 2019M**

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL
BELI PETASAN YANG MENGANDUNG BAHAN PELEDAK**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

DEVI AGUSTIN
NPM: 1521030037

Jurusan: Muamalah

Pembimbing I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.
Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

Dalam hukum Islam, jual beli merupakan sebuah kegiatan muamalah yang memudahkan manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Kegiatan jual beli dan tradisi menyalakan petasan merupakan sebuah fenomena yang biasa dilakukan oleh kalangan masyarakat. Bahkan, di sejumlah daerah menyalakan petasan menjadi sebuah tradisi dan rutinitas tahunan menyambut hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan malam pergantian tahun. Pada saat perayaan menyambut Idul Fitri, Idul Adha, ataupun malam pergantian tahun banyak masyarakat yang menjual, membeli, dan menyalakan berbagai macam petasan, baik yang berukuran kecil sampai berukuran besar, tidak jarang ledakan yang dihasilkan dari petasan menyebabkan orang yang menyalakan dan orang lain terluka.

Permasalahan ini dapat dilihat dari dua segi hukum yaitu hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dengan rumusan: bagaimana ketentuan sanksi dalam hukum positif dan hukum Islam tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak, kemudian bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mempelajari ketentuan sanksi dalam hukum positif dan hukum Islam tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak kemudian apa saja persamaan dan perbedaan pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang jual beli petasan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (*library research*), kemudian data yang terkumpul diolah menggunakan pendekatan berfikir induktif, setelah semua data terkumpul maka penulis akan menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode komparatif.

Berdasarkan data yang ada maka ditemukan bahwa kegiatan jual beli petasan dilarang dalam hukum positif dan hukum Islam, karena petasan dianggap sebagai suatu benda yang berbahaya sehingga tidak boleh untuk dipakai atau diperjualbelikan. Sanksi dalam hukum positif terdapat dalam UU No 12/DRT/1951 yaitu berupa hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup, atau penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun, kemudian sanksi dalam hukum Islam berupa hukuman *ta'zir*, hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan hukum yang jelas mengenai jual beli petasan. Sedangkan persamaan dari kedua hukum tersebut adalah sama-sama melarang kegiatan jual beli, atau menyalakan petasan. Perbedaan yang ada dalam kedua hukum tersebut yaitu terdapat di dalam sanksi hukum yang diberikan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarne Bandar Lampung , Tlp. (0721) 703289


PERSETUJUAN


Judul : **ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM TENTANG JUAL BELI PETASAN
YANG MENGANDUNG BAHAN PELEDAK**
Nama : **DEVI AGUSTIN**
NPM : **1521030037**
Jurusan : **Muamalah**
Fakultas : **Syari'ah dan Hukum**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I Pembimbing II


Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.
NIP. 195703051978031001


Badrizzaman, S.Ag., M.H.I.
NIP. 195806112000031002

Mengetahui
Ketua Jurusan/Prodi Muamalah


Dr. H. A. Kumedi Jafar, S. Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak**, disusun oleh : **Devi Agustin**, NPM : **1521030037**, Jurusan : **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/Tanggal : **Jum'at, 14 Juni 2019**.

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. Liky Faizal, S.sos., M.H.**

Sekretaris : **Muslim, M.H.I.**

Penguji I : **Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

Penguji II : **Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.**

**Dekan
Fakultas Syariah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002**

MOTTO

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”(Q.S al-Isyra’:27)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h.338.

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ayahanda Suroto dan Ibunda Inamawati, yang senantiasa dan tiada henti-hentinya memberikan doa, semangat, dukungan, yang selalu mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku. Aku semakin yakin bahwa ridha Allah SWT adalah keridhaanmu.
2. Kakak-kakakku, Ade Ari Setiyantoro dan Novita Indah Lestari yang telah memberikan semangat disetiap saat, semoga Allah juga kabulkan mimpi dan apa yang menjadi cita-citamu, semoga kita bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan.
3. Mamas Wisnu Yusup Saputra, yang terus menemani, mendoakan, memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah berikan yang terbaik juga untukmu.

RIWAYAT HIDUP

Devi Agustin, seorang anak yang dilahirkan di Desa Keputran, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1997, yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Suroto dan Ibu Inamawati.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) YPI Keputran Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Lampung lulus pada tahun 2003. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Desa Keputran Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Lampung lulus pada tahun 2009. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Pringsewu, Lampung lulus pada tahun 2012. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Lampung lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur *Alhamdulillah* dihaturkan atas kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang susun salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada jurusan Muamalah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw., para sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita tergolong umatnya.

Penyelesaian skripsi ini, banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, rasa hormat dan terimakasih disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa;
2. Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. selaku pembimbing I dan Badruzzaman, S.Ag., M.M. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. H.A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Khoiruddin, M.S.I, selaku Sekertaris Jurusan Muamalah, terimakasih atas dorongan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini;

4. Sanak saudara, Mba Istiqomah, Adikku Aiya, Rika Ulan, dan semua famili yang terus mendoakan, memberi semangat dan memberi bantuan baik secara materil maupun formil kepadaku;
5. Sahabat luar biasaku, The Ciwis, Iril Afifah Nur Latifah, Noviya Sari, Oktalia Dinata, Onti Sinditiya, dan rekan-rekan satu angkatan tahun 2015 jurusan Muamalah khususnya kelas Muamalah H yang tak dapat kusebut satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama ini, terimakasih atas, tawa, canda, tangis, duka, bahagia, dukungan, perjuangan dan kebersamaan yang kita lewati bersama selama ini;
6. Sahabat yang aku sayangi, Girls Squad, Ani Kurniawati, Kartika Candra Novia yang tidak pernah bosan memberiku doa dan semangat.
7. Keluarga Kosan Pelangi 2, Diah Intan Saputri, Ayuk Kinan, Imro'atus Solikhah, Eka Dewi Rohayati, Hasnak, Uni Fitri, Uni Eza, Uni Dian, Liskha Akhfa Diana, Mba Epi Pajaria, Nisa, dan semuanya yang selalu memberikan semangat dan dukunganya kepadaku;
8. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga dapat menyelesaikan karya tulis ini;
9. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas Syari'ah, perpustakaan Fakultas dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuannya dalam menyelesaikan karya tulis ini;

10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu pengetahuan;
11. Semua pihak dari dalam maupun dari luar yang telah memberikan dukungannya, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan;

Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, namun saat ini telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan, sehingga skripsi ini akan lebih baik dan sempurna dimasa mendatang.

Akhirnya semoga karya tulis ini bermanfaat bagi diri pribadi khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 26 Januari 2019

Penulis,

Devi Agustin

NPM. 1521030037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori tentang Jual Beli	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Macam – macam Jual Beli	28
B. Teori tentang Petasan	34
1. Tinjauan Umum Masalah Petasan	34
2. Sejarah Petasan	36
3. Petasan dan Hukum di Indonesia	41
4. Petasan dan Kebudayaan Betawi	44
C. <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	46
1. Arti dan Dasar <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	46
2. Pembagian <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	47
BAB III PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PETASAN	
A. Pandangan Hukum Positif tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak	51
B. Pandangan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak	64
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Ketentuan Sanksi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak	72

B. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak.....	78
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran - saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum diadakan suatu pembahasan lebih lanjut tentang judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari judul. Karena judul merupakan sebuah kerangka awal dalam bertindak, apalagi di dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka dari itu perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini.

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul: **“ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PETASAN YANG MENGANDUNG BAHAN PELEDAK”**. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dsb).²
2. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan dan menetapkan suatu tindakan.³

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.58.

³Wikipedia, “Hukum Positif”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_positif, diakses pada tanggal 13 mei 2019.

3. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁴ Hukum Islam merupakan kepercayaan umat Islam bahwa hidup mereka harus diatur oleh bentuk yang diwahyukan Allah dan sanksi hukum yang mempengaruhi rutinitas sehari-hari, seperti shalat, perkawinan dan kegiatan komersial yaitu jual beli, sewa-menyewa, gadai.⁵
4. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan Syara' dan disepakati.⁶
5. Petasan atau yang biasa disebut mercon adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, biasanya bersumbu, digunakan untuk memeriahkan berbagai peristiwa, seperti perayaan malam pergantian tahun, hari raya idul fitri, perkawinan, dan lain sebagainya.⁷
6. Bahan peledak kimia adalah material yang tidak stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada

⁴Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1990), h.42.

⁵Syaful Mudawam, Syari'ah-Fiqih-Hukum Islam, dalam jurnal *Asy-Syir'ah* Vol.46.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.68.

⁷Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.135.

tekanan (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut dengan ledakan.⁸

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dari judul penelitian ini secara keseluruhan adalah suatu pengkajian atau suatu penganalisaan mengenai seperangkat peraturan dilihat dari hukum positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli petasan yang mengandung bahan peledak.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Karena banyaknya fenomena jual beli petasan dan tradisi menyalakan petasan pada hari-hari tertentu yang dilakukan baik anak kecil maupun orang dewasa tanpa memperdulikan bahaya yang ditimbulkan. Dalam Islam tidak ada larangan melakukan jual beli, akan tetapi Islam melarang jual beli yang dapat menimbulkan bahaya bagi umat manusia.

2. Alasan Subjektif

Permasalahan yang akan dibahas sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, selain itu kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu hukum ekonomi Islam.

⁸Wikipedia, "Bahan Peledak", https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_peledak, diakses pada 12 September 2018.

C. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan manusia yang berperan sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup sendiri, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh sebab itu, perlunya berhubungan dengan orang lain.

Setiap manusia yang hidup di dunia ini selalu dituntut dan diburu oleh kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan primer (kebutuhan pokok), sekunder (kebutuhan pelengkap), maupun kebutuhan tersier (mewah). Semua ini dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan hidupnya, untuk melakukan semua itu mereka melakukannya dengan berbagai macam cara. Yang di antaranya adalah dengan cara bercocok tanam, bekerja sebagai pegawai negeri, berdagang, menjadi nelayan dan lain sebagainya. Di antara seluruh kegiatan usaha tersebut salah satunya adalah kegiatan jual beli.⁹ Kegiatan menjual dan membeli sudah menjadi hal yang biasa dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik dalam hal aqidah, ibadah, akhlaq maupun muamalah (Ekonomi Islam).¹⁰ Muamalah sendiri diartikan sebagai hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam

⁹Shalah Ash-Shawi dan Abdulah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.25.

¹⁰Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.120.

persoalan-persoalan keduniaan, salah satunya adalah dalam hal mengatur kegiatan ekonomi.¹¹

Muamalah terbagi menjadi dua pengertian, yakni muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas mencakup masalah al-ahwal al-syahsiyah (hukum keluarga), pokok kajiannya meliputi munakahat, waris, hibah, wasiat, dan wakaf. Sedangkan muamalah dalam arti sempit membahas jual beli, gadai, salam, pemindahan utang dan lain sebagainya.¹²

Kegiatan jual beli disini termasuk bagian dari muamalah. Adapun muamalah merupakan aturan main dalam kehidupan sosial. Muamalah menempatkan kehidupan individu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.¹³ Muamalah atau jual beli dibenarkan dan sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang meskipun bentuknya berbeda. Berbagai macam bentuk jual beli harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam Islam. Hukum jual beli adalah diperbolehkan. Allah SWT telah menghalalkan praktek jual beli.¹⁴ Kebolehan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

¹¹Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.20.

¹²Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.8.

¹³Fathurrahman Djamil, *Op.Cit.*, h.34.

¹⁴Salim Segaf al-Jufrie, Miftah Faridl, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.364.

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (Q.S. An-Nisa’:29).¹⁵

Kemudian dalam Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”.¹⁶

Pada dasarnya kegiatan jual beli dibenarkan oleh Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’. Kegiatan jual beli diperbolehkan asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut benda yang dijadikan objek dalam jual beli itu, apakah benda tersebut suci, memberi manfaat, dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan masyarakat jual beli petasan sudah terjadi sejak dahulu, kegiatan jual beli, menyalakan atau membakar petasan juga sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Bahkan pada hari-hari tertentu, seperti hari raya idul fitri dan malam pergantian tahun, menyalakan petasan sudah menjadi sebuah tradisi dan rutinitas tersendiri. Tetapi pada kenyataannya kegembiraan yang ada dalam pesta petasan tersebut seringkali menimbulkan masalah. Ini dikarenakan ledakan yang timbul akibat membakar petasan tersebut tidak jarang melukai diri sendiri, bahkan orang lain. Petasan dapat menyebabkan kerugian jiwa ataupun materi. Sebagai contoh kasus gudang petasan yang meledak dan menewaskan sedikitnya 47 orang di Kosambi, Tangerang, Banten pada Kamis 26 Oktober 2017.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h.107.

¹⁶Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.107.

Jual beli petasan tidak diperbolehkan. Adapun ketentuan tentang petasan dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951 yang berbunyi:

Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Memperhatikan hal di atas peneliti tertarik untuk membahas masalah yang ada tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berbentuk sebuah skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Sanksi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penulisan diantaranya:

1. Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Ketentuan Sanksi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak.
- b. Untuk Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak

2. Manfaat Penelitian ini antara lain adalah:

- a. Secara akademis penelitian ini bertujuan untuk memperluas ilmu pengetahuan dilingkungan kampus UIN Raden Intan Lampung, terutama Fakultas Syariah dan khususnya untuk menambah referensi sebuah kajian, dimana penulis sangat berharap agar penelitian ini memberikan gambaran secara jelas mengenai hukum jual beli petasan.
- b. Secara praktis, agar masyarakat mengetahui tentang fenomena yang ada dilingkungan masyarakat, lebih mengetahui aturan dan hukum yang berlaku berhubungan dengan tema penelitian tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu pengetahuan yang benar, maka akan diperlukan metode yang bisa mengantarkan penelitian mendapatkan sebuah data yang valid dan data yang otentik. Beranjak dari hal tersebut, maka perlu untuk menentukan suatu cara atau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan dengan baik dan optimal. Maka dari itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.¹⁷ Pada penelitian ini penulis memfokuskan untuk mencari data-data yang berkaitan dengan kegiatan jual beli.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta, sifat, dan hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁸

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer sendiri merupakan literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu al-Qur'an, hadits, dan Undang-Undang tentang bahan peledak.¹⁹

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu sumber yang diperoleh bertujuan untuk memperkuat data yang diperoleh buku-buku, hasil seminar, makalah, majalah, akses artikel internet dan literatur-literatur

¹⁷Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Taruna Grafika: Bandung, 2000), h.33.

¹⁸Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.47.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.68.

tentang jual beli yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan.

Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi data primer.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah *Library Research* (kepastakaan), yaitu pengumpulan data-data dan informasi menggunakan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di dalam ruang perpustakaan.²¹ Teknik kepastakaan sendiri adalah sebuah penelitian kepastakaan yang dilaksanakan dengan cara-cara seperti membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan-bahan bacaan yang kiranya dianggap sesuai dengan pokok-pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.²² Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kepastakaan, oleh sebab itu pengumpulan data yang akan digunakan dalam pencarian data dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara lain dengan pengkajian literatur-literatur primer.

Kemudian akan dilengkapi juga dengan literatur-literatur dan bahan data sekunder yang berkaitan secara relavan untuk menunjang penyelesaian pokok permasalahan.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

²⁰*Ibid.*, h.69.

²¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Bandar Maju, 1996), h.33.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.114.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data ialah “pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan”.²³

b. Sistematika Data (*Sistematizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut sebuah kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku dan dapat dimengerti”.²⁴ Setelah data-data terkumpul, maka penulis akan membahas dengan cara menganalisis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

Adalah “pola berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus”.²⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai hukum positif dan hukum Islam tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak. Dari

²³Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h.91.

²⁴Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.3.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h.236.

gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Metode Komparatif

Suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengadakan perbandingan secara sistematis dan terus-menerus sehingga diperoleh kesimpulan. Penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, orang, dan prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.²⁶ Cara berfikir komparatif dalam penelitian ini membandingkan data-data yang terkumpul dari hasil penelitian tentang persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap ketentuan sanksi jual beli petasan.

²⁶*Ibid.*, h.236.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti (البيع) *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.²⁷ Lafal *al-Bai'* terkadang juga digunakan untuk pengganti lawannya, yakni kata *asy-syira'* (الشراء) yang berarti beli. Dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.²⁸ Sebagaimana Allah Swt. Berfirman dalam Q.S Fathir ayat 29 yang berbunyi:

...يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: "...mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi" (Q.S Al-Fathir: 29).²⁹

Dan yang disebutkan oleh penulis kitab Fiqh Muamalah sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُّطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

"Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak."³⁰

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

²⁷Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), h. 75.

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.111.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h.620.

³⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Sinar Grafika Offset, 2010), h.173.

a. Jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan.³¹

b. Menurut Imam asy-Syafi'i:

مُقَا بَلَّةٌ مَّالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”³²

Disini maksudnya adalah suatu bentuk pertukaran harta dengan harta yang dilandasi dasar saling rela atau suka sama suka.

c. Jual beli sendiri menurut ulama Malikiyah terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Yang dimaksud dengan jual beli di dalam arti umum adalah suatu bentuk perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan perikatan sendiri merupakan akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa suatu benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Sedangkan yang dimaksud jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.67.

³² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h.73.

mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³³

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli sendiri ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau tukar-menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), dengan cara yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syara' dan telah disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya adalah telah memenuhinya persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak Syara'.³⁴

Sedangkan yang dimaksud benda sendiri dapat mencakup pengertian suatu barang atau uang, sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang bisa dibagi-bagi, ada kalanya tidak bisa dibagi-bagi, ada harta yang terdapat perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*). Penggunaan harta tersebut diperbolehkan

³³Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.70.

³⁴*Ibid.*, h.68.

sepanjang tidak dilarang oleh Syara'. Contohnya seperti alkohol, babi, dan bahan-bahan terlarang lainnya haram untuk diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dianggap batal dan jika dijadikan sebagai harga penukar, maka jual beli itu dianggap *fasid* (rusak).³⁵

Harta sendiri dalam pandangan fuqaha terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Mutaqawwim*, yaitu yang disahkan Syara' untuk dimanfaatkan.
- b. *Ghairu muttaqawwim*, yaitu harta yang dilarang Syara' untuk digunakan.³⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Kegiatan jual beli sudah menjadi suatu kebiasaan yang dijadikan sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, dan Ijma' para ulama tentang jual beli.³⁷ Adapun landasan hukum dari kegiatan jual beli diantaranya sebagai berikut:

- a. Landasan al-Qur'an

al-Qur'an ialah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan sumber utama, pertama dan sumber pokok bagi hukum Islam.³⁸ Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

³⁵*Ibid.*, h.69.

³⁶Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h.32.

³⁷Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.113.

³⁸Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.73.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.³⁹

Dan dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁰

³⁹ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h.58.

⁴⁰ *Ibid.*, h.107.

Pada ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT telah memperbolehkan jual beli asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. Sunnah Rasulullah SAW

Sunnah Rasulullah SAW mengenai jual beli adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya "pekerjaan apa yang paling baik?" beliau menjawab, "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih".⁴¹ (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara yang baik, jujur, tanpa diiringi dengan kecuranngan-kecurangan mendapat ridho dari Allah.

Rasulullah Saw bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli itu hanya sah dengan saling merelakan" (HR. Ibnu Majah).⁴²

Dalam riwayat at-Tirmizi Rasulullah bersabda:

⁴¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jawa Barat: PT Media Utama, 2016), h.202.

⁴²Sohari Sahrani, dan Ru'fan Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.68.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, para siddiqin, dan para syuhada’”.⁴³

c. Ijma’

Ijma’ sendiri adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum syar’i mengenai suatu kejadian atau kasus.⁴⁴

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.⁴⁵

Berdasarkan uraian-uraian diatas kegiatan jual beli hukumnya diperbolehkan (mubah) asal di dalam jual beli yang dilakukan memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli dan memenuhi syarat-syarat hukum Islam.

Islam melindungi semua manusia di dalam kepemilikan harta yang telah dimilikinya dan akan memberi jalan keluar bagi masing-masing manusia agar dapat memiliki harta orang lain dengan jalan yang sudah ditentukan, dalam Islam sebuah prinsip dari perdagangan yang diatur ialah kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Prinsip dari muamalah adalah sebagai berikut:

⁴³Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.114.

⁴⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: CV Rajawali Pers,1993), h.64.

⁴⁵ Rachmat Syafe’i, *Op.Cit.*, h.75.

- a. Prinsip kerelaan;
- b. Prinsip bermanfaat;
- c. Prinsip tolong menolong; dan
- d. Prinsip tidak terlarang.⁴⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli merupakan hal yang penting dalam kegiatan jual beli. Secara bahasa rukun ialah suatu hal yang harus dipenuhi untuk syahnya sebuah pekerjaan.⁴⁷ Rukun merupakan kata mufrad dari jama' "arkan" artinya asas atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.⁴⁸ Sedangkan syarat adalah sebuah ketetapan (peraturan) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Kegiatan jual beli mempunyai tiga rukun, diantaranya *sighat* atau akad (ijab kabul), pelaku transaksi (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek transaksi).⁴⁹

- a. *Sighat*, terdiri dari *ijab* dan *qabul*.⁵⁰

Ijab sendiri ialah perkataan dari penjual, seperti saya jual barang ini dengan harga sekian. Sedangkan *qabul* ialah perkataan dari pembeli, seperti saya membeli barang ini dengan harga sekian.

⁴⁶Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h.144.

⁴⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.966.

⁴⁸M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.300.

⁴⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.102.

⁵⁰Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.401.

Sighat atau akad adalah ikatan kata dari penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan qabul belum dilakukan, karena ijab qabul menunjukkan suatu rasa kerelaan (keridhaan).⁵¹ Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan cara lisan (ucapan), tetapi jika mungkin orang yang melakukan transaksi bisu atau yang lainnya, ijab kabul boleh dilakukan dengan cara surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat karena kerelaan sendiri berhubungan dengan hati, kerelaan bisa dilihat melalui tanda-tanda lahirnya, tanda-tanda yang jelas menunjukkan sebuah kerelaan ialah ijab dan kabul, Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (روه ابو داود)

Artinya: “*Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai*”. (HR. Abu Daud).⁵²

Jual beli yang sudah menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-sehari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa Ulama Syafi’iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta’akhirin Syafi’iyah berpendirian bahwa

⁵¹ Eka Nuraini Rachmawati, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Vol. XII, No. 4 (Online), tersedia di: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah> (Desember 2015), h. 2.

⁵² Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.70.

boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.⁵³ Adapun syarat sah dari ijab kabul adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh ada yang memisahkan, dalam artian pembeli tidak boleh diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Janganlah diselingi oleh kata-kata lain diantara ijab dan kabul.⁵⁴
- 3) Beragama Islam, syarat ini merupakan syarat khusus bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang bukan beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah telah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin,⁵⁵ firman-Nya dalam Q.S An-Nisa: 141 yang berbunyi:

...وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.⁵⁵

- b. *Al-Muta'qidain* yaitu orang yang melakukan suatu akad jual beli, yang terdiri dari penjual serta pembeli.

⁵³ *Ibid.*, h.71.

⁵⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.110.

⁵⁵ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h.132.

Rukun jual beli kedua adalah dua atau beberapa orang yang akan melakukan akad. Berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad antarlain:

1) Baligh dan berakal.

Syarat orang yang melakukan akad baligh dan berakal bertujuan agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.⁵⁶ Allah Swt berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ...

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya...” (Q.S An-Nisa:5).⁵⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Illat larangan tersebut karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan kabul.⁵⁸

Adapun bagi anak kecil mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa sebuah keuntungan

⁵⁶Hendi Suhendi, *Op.cit.*, h.74.

⁵⁷Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.100.

⁵⁸Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.75.

bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka hukumnya sah. Tetapi sebaliknya, apabila akad tersebut membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkan, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan.⁵⁹

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakal itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun telah mendapatkan izin dari walinya.⁶⁰

2) Tidak Pemboros

Bagi orang yang pemboros jika ia melakukan akad jual beli maka akadnya tidak sah. Karena orang yang pemboros adalah orang yang senang menghambur-hamburkan hartanya. Firman Allah SWT mengenai pemborosan terdapat di dalam Surat Al-Isyrah' ayat 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*” (Q.S Al-Isyrah':27).⁶¹

3) Dengan kehendak sendiri (bukan karena paksaan)

Dengan kehendak sendiri artinya prinsip dasar dari jual beli adalah dengan suka sama suka diantara penjual dan pembeli,

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*,h.115.

⁶⁰ *Ibid.*, h.116.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.388.

apabila prinsip ini tidak terpenuhi maka akad jual beli yang dilakukan dianggap tidak sah.⁶² Adapun firman Allah dalam surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (Q.S An-Nisa:29).⁶³

c. *Ma'qud alaih* (benda yang dijadikan objek)

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*). Objek jual beli sendiri terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁶⁴ Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:

1) Suci bendanya

Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya, para ulama telah sepakat mengenai keharamannya dengan berdalil pada QS. Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

⁶²Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h.105.

⁶³Departemen Agama RI, *Ibid.*, h.107.

⁶⁴Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.89.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ ...

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi...” (QS. Al-Baqarah:173).⁶⁵

Dan di dalam QS. Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ ...

Artinya: “diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi...” (QS. Al-Maidah:3).⁶⁶

2) Memberi manfaat menurut Syara’

Maksud barang yang bermanfaat ialah kemanfaatan dari barang tersebut telah sesuai dengan syari’at Islam. Maksudnya pemanfaatan dari barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.⁶⁷ Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara’. Contohnya seperti menjual babi, khamr, cicak, dan yang sebagainya.

3) Tidak dibatasi waktunya

Contohnya seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara’.

4) Dapat diserahterimakan

⁶⁵Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.32.

⁶⁶*Ibid.*, h.142.

⁶⁷Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.144.

Maksudnya adalah penjual bisa menyerahkan suatu barang yang telah dijadikan sebagai objek jual beli yang sesuai dengan bentuk maupun jumlah yang telah diperjanjikan saat waktu penyerahan kepada pembeli. Adapun barang yang dijadikan objek tersebut bisa diserahkan secara cepat maupun secara lambat, tidaklah sah apabila menjual binatang yang sudah lari dan tidak bisa ditangkap lagi. Barang-barang yang telah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali sebab samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, yang tidak dapat diketahui dengan pasti ikan tersebut karena di dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.⁶⁸

5) Milik sendiri (milik orang yang melakukan akad)

Milik sendiri maksudnya adalah orang yang sedang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang merupakan pemilik sah dari barang tersebut sehingga apabila melakukan akad telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.⁶⁹

Maka dari itu tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.⁷⁰ Misalnya, seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya jual beli dan dianggap batal.

⁶⁸Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.72.

⁶⁹Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, h.145.

⁷⁰Mardani, *Op.Cit.*, h.104.

6) Barang yang sudah jelas zat, ukuran dan sifatnya (benda tersebut dapat diketahui).

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁷¹ Jika barang tersebut sesuai dengan yang telah disepakati, maka wajib membelinya, tetapi jika tidak sesuai dengan yang telah disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak.⁷²

4. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi diantaranya:⁷³

a. Ditinjau dari segi hukumnya

Jika ditinjau dari segi hukumnya Ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi dua macam yaitu:

1) Jual beli yang sah atau sah menurut hukum

Jual beli dianggap sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang tersebut bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan khiyar, maka jual beli tersebut dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.⁷⁴ Jual beli yang sah dapat dilarang dalam syariat jika melanggar ketentuan

⁷¹Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.73.

⁷²Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.119.

⁷³Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.72.

⁷⁴Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.121.

pokok, yaitu menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasar, dan mengganggu ketentraman umum.⁷⁵

2) Jual beli yang batal menurut hukum

Suatu kegiatan jual beli dianggap batal atau tidak sah jika salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di syariatkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual tersebut barang-barang yang dilarang oleh syara'.⁷⁶ Seperti menjual khamr, daging babi dan lain sebagainya.

Adapun jenis-jenis jual beli yang batal ialah sebagai berikut⁷⁷:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama sepakat bahwa jual beli seperti ini dianggap tidak sah atau batal. Contohnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum bermunculan di pohonnya atau jual beli anak sapi yang masih ada di dalam perut induknya. Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ , وَالْمَلَأِ قَيْعِ (رواه البزار)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi Saw melarang jual-beli anak hewan dalam kandungan dan mani ternak jantan” (Riwayat al-Bazzar).⁷⁸

- b) Jual beli barang yang terdapat unsur penipuan (Gharar). Jual beli seperti ini dilarang oleh hukum perdata Islam.⁷⁹ Seperti

⁷⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prena Media, 2005), h.105.

⁷⁶Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.122.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*, h.215.

memperjualbelikan kurma yang di tumpuk. Diatasnya bagus-bagus dan manis, tetapi ternyata di dalam tumpukan tersebut banyak yang sudah busuk.

- c) Jual beli benda-benda najis. Seperti babi, khamr, bangkai, dan darah, semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis. Menurut jumhur ulama termasuk jual beli najis ini adalah memperjualbelikan anjing, baik anjing yang dipersiapkan untuk menjaga rumah maupun untuk berburu.⁸⁰ Rasulullah Saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ (رواه البخار)

Artinya: *Dari Abu Mas'ud al-Anshory ra. Rasulullah Saw.* "melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, hasil praktek prostitusi, dan upah pertenungan" (HR. al-Bukhari).⁸¹

- d) Jual beli al-'arbun, urbun atau arbun dalam bahasa Arab berarti meminjamkan dan memajukan. Jual beli arbun yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah, tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan, Rasulullah Saw bersabda:

⁷⁹Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.148.

⁸⁰Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.123.

⁸¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*, h.203.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْبُؤْنَ (رواه
أبو داود)

Artinya: “*Rasulullah Saw melarang jual beli arbun*” (HR. Abu Daud).⁸²

Selain hukum jual beli di atas, Ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Jika kerusakan di dalam jual beli tersebut terkait dengan barang yang diperjualbelikan maka jual beli tersebut dianggap batal, tapi apabila kerusakan pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dianggap sebagai jual beli *fasid*.⁸³

b. Ditinjau dari segi objek jual beli

Ditinjau dari segi benda, menurut Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini biasa dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli baju di pasar.⁸⁴

2) Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam janji

Adapun jual beli yang disebutkan sifatnya didalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut para pedagang, salam

⁸²*Ibid.*, h.124.

⁸³*Ibid.*, h.125.

⁸⁴Hendi Suhendi *Op.Cit.*, h.76.

merupakan jual beli yang tidak tunai, pada awalnya salam berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga batas waktu tertentu, sebagai imbalan atas harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam jual beli salam berlaku semua syarat dalam jual beli dan syarat-syarat tambahannya adalah sebagai berikut:

- a) Saat melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b) Saat melakukan akad harus disebutkan segala sesuatu yang dapat mempertinggi dan memperendah harga barang tersebut, misalnya barang tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas tersebut, jika kain sebutkan jenis kainnya. Pada intinya disebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c) Mengenai barang yang diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d) Masalah harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.⁸⁵

3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat.

⁸⁵ *Ibid.*

Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam sebab barangnya tidak jelas atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut di dapatkan dari hasil curian atau barang-barang titipan yang akibatnya bisa menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah, wortel dan yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan gharar.

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek)

Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) terbagi menjadi tiga bagian,⁸⁶ yaitu:

1) Jual beli dengan lisan

Akad ini merupakan akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu akad diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

2) Jual beli dengan perantara

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan,

⁸⁶*Ibid.*, h.77.

misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro. Jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli salam.

3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan).

Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah *Mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, yang sudah dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.⁸⁷

D. TEORI PETASAN

1. Tinjauan Umum Masalah Petasan

Petasan atau mercon merupakan peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam penggunaannya, fungsi petasan digunakan untuk memeriahkan berbagai peristiwa, seperti perayaan tahun baru, lebaran, perkawinan, dan sebagainya. Di Negara Cina petasan disamping hal tersebut juga untuk pembukaan toko pertama kali, mengusir roh jahat dan menantu yang tidak disukai keluarga pihak suami.⁸⁸

Dalam masyarakat kata petasan terdengar tidak asing lagi. Fenomena petasan memang sudah banyak di jadikan oleh masyarakat untuk merayakan

⁸⁷*Ibid.*, h.78.

⁸⁸Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.135.

suatu acara atau hajatan. Perayaan seperti hari besar pada masyarakat Tionghoa atau tradisi budaya pada masyarakat Betawi merupakan sedikit dari sebuah perayaan yang menggunakan petasan.⁸⁹

Adapun orang betawi menyalakan petasan jika sedang melakukan acara pernikahan, sunatan sebagai undangan untuk orang sekelilingnya, sebagai suatu pemberitahuan atau undangan, sebagai suatu pertanda bahwa besan telah datang, atau anak telah selesai dikhitankan, maulid Nabi dan lain sebagainya.

Petasaan sendiri adalah suatu benda, berdaya ledak rendah (*low explosive*). Bubuk yang digunakan sebagai isi petasaan yaitu bahan peledak kimia yang membuatnya bisa meledak dalam kondisi tertentu.⁹⁰ Petasan merupakan salah satu bahan peledak yang memiliki daya ledak rendah yang dilarang oleh negara, karena banyak sekali kasus yang terjadi akibat ledakan petasan terutama saat bulan ramadhan tiba.

Di dalam petasan mengandung bahan yang berbahaya dan beracun. PP No. 74 Tahun 2001 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, merumuskan pengertian bahan berbahaya dan beracun sebagai berikut:

“Bahan yang karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”.⁹¹

⁸⁹Isa Fatoni Hidayat, Tindakan Kolektif Perlawanan Pembuat Petasan Terhadap Aturan Hukum di Kampung Petasan Kabupaten Jombang, dalam jurnal *Idea Societa*, Vol.3.

⁹⁰Tina Asmarawati, *Op.Cit.*, h.135.

⁹¹Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), h.42.

Selain digunakan sebagai bahan pembuat petasan dan kembang api, mesiu saat ini banyak digunakan sebagai propelan peluru dan roket, roket sinyal, petasan, sumbu ledak, dan sumbu ledak tunggu. Adapun beberapa komposisi pembuatan *black powder* yang diketahui antara lain:

- a. Campuran antara *potasium nitrat* (KCO_3), *charcoal*, dan belerang.
- b. Campuran antara *sodium nitrum* (NaN_3), *charcoal*, dan belerang.
- c. Campuran antara *potasium nitrat* dan *charcoal* (tanpa belerang).

Pyrodex merupakan sebuah campuran antara *potasium nitrat*, *potasium perklorat* (KClO_4), *charcoal*, belerang, *cyanoguanidin*, *sodium benzoate*, dan *dekstrin*. Ketiga bahan tersebut jika dimasukkan kedalam sepotong bambu yang terdapat sumbunya lalu dibakar bisa meletus dan mengeluarkan suara ledakan keras yang dipercayai dapat mengusir roh jahat.⁹²

2. Sejarah petasan

Petasan asal mulanya dari Cina. Sekitar abad ke-9, seorang juru masak dengan tidak sengaja telah mencampur tiga bahan bubuk hitam (*black powder*) yakni garam peter (*kalium nitrat*), belerang (*sulfur*), dan arang dari kayu (*charcoal*) yang berasal dari dapurnya yang ternyata campuran ketiga bahan itu mudah terbakar.

Bahan peledak kimia sendiri merupakan sebuah rakitan yang terdiri dari bahan-bahan berbentuk padat ataupun cair yang dicampur keduanya, jika terkena benturan, panas, dan gesekan dapat mengakibatkan sebuah reaksi

⁹² Tina Asmarawati, *Op.Cit.*, h.136.

berkecepatan tinggi disertai terbentuknya gas-gas dan mengakibatkan efek panas serta tekanan yang sangat tinggi.⁹³

Bahan peledak kimia dibedakan menjadi dua macam, antarlain *low explosive* dan *high explosive*. Bahan peledak *low explosive* ialah bahan peledak yang berdaya ledak rendah dan memiliki kecepatan detonasi antara 400 dan 800 meter per detik. Sedangkan bahan peledak *high explosive* memiliki kecepatan detonasi antara 1.000 dan 8.500 meter per detik. Bahan peledak *low explosive* ini sering disebut *proplean* (pendorong) yang banyak digunakan pada peluru dan roket.

Bahan peledak *low explosive* yang dikenal adalah mesiu (*black powder* atau *gun powder*) dan *smokeless powder*. Sebagai masyarakat Indonesia, mesiu tersebut banyak digunakan sebagai pembuatan petasaan, termasuk petasaan banting dan bom ikan. Bubuk mesiu adalah jenis bahan peledak tertua yang ditemukan oleh bangsa Cina pada abad ke-9. Dalam perkembangannya, petasaan jenis ini dipakai juga dalam perayaan pernikahan, kemenangan perang, peristiwa gerhana bulan, dan upacara-upacara keagamaan.

Pada saat dinasti Song didirikan pabrik petasan yang kemudian menjadi dasar dari pembuatan kembang api sebab lebih menitik beratkan pada warna-warni dan bentuk pijar-pijar api diangkasa sehingga pada akhirnya dibedakan. Tradisi petasan lalu menyebar ke seluruh pelosok dunia.⁹⁴

Dalam beberapa literatur Cina dicatat bahwa mesiu pertama kali ditemukan pada masa Dinasti Sung (960-1279). Orang Cina menemukan

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*, h.137.

bubuk mesiu yang merupakan campuran dari *potasium nitrat*, *sulfur*, hingga *charcoal* yang jika digabungkan dengan oksigen akan menimbulkan ledakan dan cahaya yang menyembur. Selain digunakan dalam peperangan ketika Cina akan menghadang ekspansi Mongol yang ketika itu dipimpin oleh Kaisar Kubelai Khan pada tahun 1279, mesiu digunakan juga untuk penyemarakan pesta tradisi Cina yaitu pernikahan dengan spiritualitas dasar bertujuan untuk mengusir roh-roh jahat yang dianggap bisa mengganggu perayaan dan pesta.

Di dalam versi yang lain tradisi petasan dan kembang api sendiri berawal di Cina pada abad ke-11 yang kemudian menyebar ke Jazirah Arab pada abad ke-13 dan selanjutnya ke daerah-daerah lain. Tradisi petasan dibawa oleh Orang Tiang Hoa yang datang dan menetap di Indonesia. Orang Tiang Hoa yang datang pertama kali dinusantara khususnya di Jawa yakni seorang pendeta Budha Fa Hien (Faxien) pada tahun 413. Ia kembali ke Cina karena tidak didapati orang tionghoa. Dalam banyak literatur ditulis bahwa orang Tiong Hoa yang datang ke Indonesia ternyata hanya berasal dari dua propinsi yakni Fukien dan Kwang Tung.⁹⁵

Dalam catatan sejarah, kehadiran bangsa Tiong Hoa di Indonesia melalui tiga tahap, yaitu⁹⁶:

- a. Tahap pertama, yaitu tahap kerajaan. Orang-orang yang datang pada tahap ini kebanyakan para pedagang. Karena melihat muslim angin yang baik, mereka ini berlayar dan pada akhirnya tiba di perairan Indonesia.

⁹⁵ *Ibid.*, h.138.

⁹⁶ *Ibid.*

b. Tahap kedua, yaitu setelah kedatangan bangsa Eropa di Asia Tenggara pada abad ke-16. Motif kedatangan mereka sampai ke Indonesia yaitu untuk berdagang. Kedatangan Inggris, Spanyol, Belanda dan Portugis menambah semangat orang Tiong Hoa dalam berdagang.

c. Tahap ketiga. Pada tahap ketiga Indonesia dibawah pemerintah Belanda. Orang-orang Tiong Hoa banyak yang berada di pesisir utara pulau Jawa untuk berdagang. Selain itu, kehadiran mereka juga dikarenakan oleh kebijakan pemerintah Belanda yang dengan sengaja mendatangkan orang Tiong Hoa sebagai tenaga kerja di proyek-proyek pertambangan dan pelabuhan.

Seorang sejarawan Betawi mempercayai bahwa tradisi pernikahan orang Betawi yang menggunakan petasan untuk memeriahkan suasana merupakan adopsi tradisi dari orang-orang Tiong Hoa yang bermukim disekitar mereka.

Melihat catatan sejarah yang cukup mencolok terkait peristiwa 1740 yaitu kerusuhan etnis Tiong Hoa di Batavia. Pada tahun itu terjadi pembantaian 10.000 orang etnis Tiong Hoa yang tidak berdosa di Ommelanden, daerah pinggiran atau pendalaman Batavia. Pembantaian itu dilatarbelakangi oleh persaingan dagang. Pedagang Belanda, Inggris, Spanyol dan Portugis kalah bersaing dengan pedagang Tiong Hoa sehingga mereka menghasut penduduk kota Batavia untuk membantai etnis Tiong Hoa.

Adapun versi yang lain menyebutkan yakni terkait dengan kerawanan sosial karena banyaknya penduduk Tiong Hoa yang menjadi pengangguran.

Dengan alasan inilah pemerintah Belanda membantai mereka. Tidak jelas apa tujuan pembantaian etnis Tiong Hoa tahun 1740 itu.⁹⁷

Setelah peristiwa itu Etnis Tiong Hoa di Batavia. Mereka melarikan diri ke daerah-daerah pinggiran di Batavia seperti Tangerang, Parung, Serpong, Parung Panjang, Tenjo, Cisauk, Teluk Naga dan Balaraja. Mereka kemudian disebut dengan Cina Benteng. Mereka ternyata membawa terus adat kebiasaan mereka seperti menyalakan petasan menjelang perayaan Peh Cun atau perayaan tradisi Cina lainnya. Parung Panjang, sebuah desa di sebelah barat Serpong sampai saat ini masih dikenal sebagai pusat penghasil petasan terbesar di Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu tradisi menyalakan atau membakar petasan ini dicontoh dan di pergunakan oleh orang-orang Betawi sampai saat ini, terutama pada saat menjelang pesta perkawinan atau khitanan. Hal ini tidak berhenti di situ saja, sebab ternyata dalam perkembangan waktu petasan memeriahkan bulan suci ramadhan bagi umat Islam. Arti simbolis petasan dalam tradisi Cina dan Betawi yakni sebagai alat komunikasi. “pada jaman dulu jarak rumah penduduk berjauhan”. Untuk memberitahu bahwa adanya pesta pernikahan atau khitanan maka orang menyalakan petasan, demikian menurut sejarah Betawi.⁹⁸

Selain itu, menyalakan petasan juga dipakai sebagai sarana untuk memberitahu para undangan dan khalayak ramai bahwa pesta akan segera dimulai. Hal yang sama juga dikatakan oleh beberapa responden dari

⁹⁷ *Ibid.*, h.139.

⁹⁸ *Ibid.*, h.140.

masyarakat Betawi yang tinggal di daerah Tangerang, Cengkareng, Bekasi. Yang masih kental memegang tradisi ini adalah masyarakat di daerah Tangerang dan sekitarnya, akan tetapi daerah bagian kota nya sudah jarang memegang tradisi ini, kecuali menjelang lebaran atau malam takbir.

Kebudayaan Betawi sendiri bersifat dinamis dan berkembang sepanjang waktu. Ia bisa menyerap berbagai unsur budaya, baik budaya yang bersifat lokal maupun budaya yang bersifat global, dan makna petasan dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan atau mengalami perubahan.

Masyarakat Betawi saat perayaan sunatan, menyambut besan. Petasan yang digunakan adalah jenis yang disebut petasan rancangan, biasanya digantung lalu disulut dengan api. Petasan ini ada beberapa macam antara lain, petasan cabe rawit, tikus dan lain sebagainya.⁹⁹

3. Petasan dan hukum di Indonesia

Di Indonesia petasan sudah menjadi sebuah tradisi yang biasa digunakan untuk menyambut malam pergantian tahun dan pada saat bulan Ramadhan tiba. Petasan termasuk barang atau benda gelap, yang berarti benda larangan. Sejak jaman Belanda sudah ada aturan mengenai hal tersebut, dalam lembaranya Negara (LN) tahun 1940 Nomor 41 tentang pelaksanaan Undang-undang Bunga Api 1939, dimana diantara lain adanya ancaman pidana kurungan tiga bulan dan denda Rp.7.500 apabila melanggar ketentuan “membuat, menjual, menyimpan, mengangkut bunga api dan petasan yang

⁹⁹ *Ibid.*, h.142.

tidak sesuai standar pembuatan” kemudian pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan, diantara UU Darurat 1951 yang ancamannya mencapai 20 tahun penjara atau hukuman mati.¹⁰⁰

Kleijis-Wijn Nobel merumuskan lingkup dan pengertian penegakan hukum lingkungan sebagai berikut:

“Penegakan dalam hukum lingkungan bergerak dalam berbagai bidang hukum. Baik hukum administrasi, hukum pidana maupun hukum perdata memainkan perannya. Penegakan hukum diartikan sebagai pengawasan dan penerapan sarana-sarana hukum administrasi, hukum pidana atau hukum perdata agar aturan-aturan hukum dan persyaratan-persyaratan yang berlaku umum dan individual dipatuhi”.¹⁰¹

Dalam hukum, pidana adalah perbuatan yang pada intinya diatur dalam buku ke-II kitab undang-undangan hukum pidana dan dalam aturan-aturan lain diluar KUHP, seperti Undang-undang darurat dinyatakan di dalamnya itu sebagai kejahatan.

Pengertian kejahatan menurut Van Bemmelen merumuskan:

“Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikannya karena kelakuan tersebut”.

Van Bemmelen melihat kejahatan dari segi kriminologi, tidak menjadi masalah apakah perbuatan itu melanggar ketentuan pidana atau tidak. Masalah petasan sudah diatur didalam peraturan perundangan-undangan sebelum lahir undang-undangan No.12/DRT/1951. Masalah petasan telah diatur oleh “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (stbt. 1948 No.17) dan

¹⁰⁰ *Ibid.*, h.144.

¹⁰¹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, h.23.

Undang-undangan R.I dahulu No.8 tahun 1948. Pasal yang mengatur petasan antara lain:

Dalam Pasal 1 berbunyi:

- 1) Barangsiapa, yang tanpa hak mememasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20an tahun.
- 2) Yang dimaksud pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari peraturan senjata Api (*vuurwaapenregeling*) (stbl 937 No.170) yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 mei 1938(stbl No.278). Tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.
- 3) Yang dimaksud dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksud dalam *Ordonnatie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis-jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*minjem*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengsels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian asumsi.

Dalam Pasal 3 berbunyi:

Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini dipandang sebagai kejahatan.

Dalam Pasal 4 berbunyi:

- 1) Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum maka penuntutan dapat dilakukan dengan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat.
- 2) Ketentuan pada ayat (1) dimuka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.

Dalam Pasal 5 berbunyi:

- (1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana atau terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga dilamana barang-barang itu tidak kepunyaan sitertuduh.
- (2) Barang-barang atau bahan-bahan yang rampas menurut ketentuan ayat (1), harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.

Dalam Pasal 6 berbunyi:

- (1) Yang disertai untuk mengurus perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 1 dan 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya telah ditunjuk untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum juga orang-orang, yang dengan Undang-undang telah atau akan ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, munisi dan bahan-bahan peledak.
- (2) Pegawai-pegawai pengusut serta orang-orang yang mengikutinya senantiasa berhak memasuki tempat-tempat, yang mereka anggap perlu dimasukinya, untuk kepentingan menjalankan dengan seksama tugas mereka. Apabila mereka dihalangi memasukannya, mereka jika perlu dapat meminta bantuan dari alat kekuasaan.

Menetapkan, bahwa segala peraturan atau ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini tidak berlaku.¹⁰²

3. Petasan dan kebudayaan betawi

Petasan merupakan benda yang sering digunakan untuk beberapa ritual budaya Betawi. Diantaranya dapat dilihat dari acara pernikahan di suatu rumah. Selalu akan menemukan “sambutan’ berupa petasan yang dibakar atau dibunyikan dengan keras. Betawi identik dengan ondel-ondel dan bunyi petasan. Mungkin, dua unsur tersebut yang tersisa sebagai jejak dari

¹⁰² Tina Asmarawati, *Op.Cit.*, h.146-149.

kebudayaan Betawi yang perlahan-lahan mulai tenggelam karena adanya modernisasi.

Sebagaimana yang telah diutarakan diawal, petasan dan kembang api merupakan suatu tradisi yang berakar dari kebudayaan Cina. Tradisi ini merupakan kebudayaan Betawi karena dibawa oleh warga Tionghoa yang bermigrasi ke Jakarta. Adapun unsur kebudayaan Cina ini menjadi elemen utama yang menyusun rancang bangun kebudayaan Betawi. Asumsinya ialah kebudayaan Betawi tidaklah statis, melainkan selalu dinamis dan berkembang seiring waktu. Betawi menyerap berbagai unsur budaya baik lokal maupun global dan mengolahnya menjadi bagian dari sebuah tradisi.

Adapun sejarah orang Cina di Batavia (nama yang diberikan oleh Belanda) sangatlah masyhur. Sejak jaman dahulu Belanda memposisikan orang Cina memiliki kelas yang berbeda dengan pribumi. Tidak heran jika mereka mempunyai posisi yang penting dan mempunyai akses yang lebih luas daripada pribumi. Mereka mempunyai kesempatan untuk mengincar proyek besar dan memperkaya dirinya sendiri.

Di dalam buku Tina Asmarawati, studi yang dibuat Leonard Blusse menyebutkan, hubungan antara Cina dan Belanda menyimpan misteri kehidupan tersendiri. Blusse mengungkapkan misteri mereka dengan istilah “persekutuan aneh”. Istilah itu sebenarnya tidak hanya sekedar menyiratkan arti harafiah hubungan dua kelompok, melainkan adalah bagian kegagalan dari rencana kolonisasi Belanda. Pada awalnya politik penduduk Batavia dilakukan dengan memenuhi pemukim-pemukim kulit putih, yaitu keluarga-

keluarga Belanda. Namun rencana ini tidak berhasil karena problem reproduksi, dimana keluarga sesama Belanda sulit membuahkan keturunan. Kegagalan yang bertubi-tubi tersebut ditebus dengan cara pendahulunya Portugis dengan pribuminya. Akan tetapi Belanda lebih sedikit mengambil perempuan pribumi. Pemerintah Hindia Belanda lebih memilih rekan bisnis yang dekat, yakni orang-orang Cina. Terjadilah apa yang disebut “persekutuan aneh” itu.¹⁰³

E. Maqashid al-Syari'ah

1. Arti dan Dasar Maqashid al-Syariah

Maqashid al-syariah menurut *lughawi* (bahasa) terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* sendiri merupakan bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, hal ini dapat dikaitkan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁰⁴

Syari'ah merupakan *al-nusus al-muqaddasah*, yang di dalamnya mencakup *aqidah*, *amaliyah*, dan *khuluqiyyah*. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Jasiah ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

¹⁰³ *Ibid.*, h.150-152.

¹⁰⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.61.

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”¹⁰⁵

Menurut Ali al-Sayis pengertian *syari'ah* sendiri adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya agar mereka mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat. Kandungan pengertian *syari'ah* tersebut secara tidak langsung memuat kandungan dari *maqashid al-syari'ah*.¹⁰⁶

Asy-Syatibi menulis tujuan *syari'ah* sebagai berikut:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ ... وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَا صِدِّ الشَّارِعُ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي دُنْيَا وَآخِرَتِهِمْ

“Sesungguhnya *syari'ah* itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”¹⁰⁷

Al-Syatibi mengatakan *maqashid al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek secara keseluruhan, dalam arti apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, maka dapat dianalisis melalui *maqashid al-syari'ah*.¹⁰⁸

2. Pembagian *Maqashid al-Syariah*

Kemaslahatan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu:¹⁰⁹

- a. *Maqashid al-Syari'* (tujuan Tuhan)
- b. *Maqashid al-Mukallaf* (tujuan mukallaf)

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.720.

¹⁰⁶ Asafri Jaya Bakri, *Op.Cit.*, h.63.

¹⁰⁷ Muhamad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), h.196.

¹⁰⁸ Asafri Jaya Bakri, *Op.Cit.*, h.68.

¹⁰⁹ *Ibid.*, h.70.

Maqashid al-Syari' dalam *maqashid al-syari'ah* terbagi menjadi 4 (empat) aspek diantaranya:

- 1) Tujuan awal dari *syariah* yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Aspek ini berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqashid al-syari'ah*.

- 2) *Syariah* sebagai sesuatu yang harus dipahami.

Aspek yang kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar *syariah* dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya.

- 3) *Syariah* sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

- 4) Tujuan *syariah* adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek yang terakhir ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum Allah SWT.

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik dalam pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan, yaitu:¹¹⁰

- a. Kemaslahatan *dharuriyyah* (inti/pokok) dari kemaslahatan *maqashid syari'ah* yang paling atas.
- b. Kemaslahatan *ghairu dharuriyyah* (bukan kemaslahatan pokok) tetapi termasuk kemaslahatan yang penting dan berhubungan.

¹¹⁰Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h.xv.

Di dalam kemaslahatan inti/pokok terdapat lima unsur pokok yang harus dijaga demi terwujudnya suatu kemaslahatan, kelima unsur tersebut antara lain:¹¹¹

a. Memelihara agama (دِينٌ)

Islam merupakan agama yang menjamin hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ...

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”¹¹²

b. Memelihara jiwa (نَفْسٌ)

Hak yang paling utama di dalam Islam adalah hak hidup, hak ini merupakan hak yang tisucikan dan tidak boleh dihancurkan.¹¹³

c. Memelihara akal (عَقْلٌ)

Akal adalah sumber pengetahuan, sinar hidayah, cahaya matahari dan sebuah media kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Dengan adanya akal, perintah Allah SWT disampaikan, dengannya juga manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi.¹¹⁴

¹¹¹Khairul Umam & Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.128.

¹¹² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.53.

¹¹³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h.22.

¹¹⁴*Ibid.*, h.91.

d. Memelihara keturunan (نَسْلٌ)

Dalam hal ini Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perlindungan yang dapat terlihat dalam sanksi berat dijatuhkan dalam masalah zina, perlindungan melalui pengharaman *ghibah*, mengadu domba, mengumpat, ataupun yang lainnya. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan serta memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih di hari kiamat.¹¹⁵

e. Memelihara harta benda (مَالٌ)

Memelihara harta menjadi salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah olehnya. Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ...

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.¹¹⁶

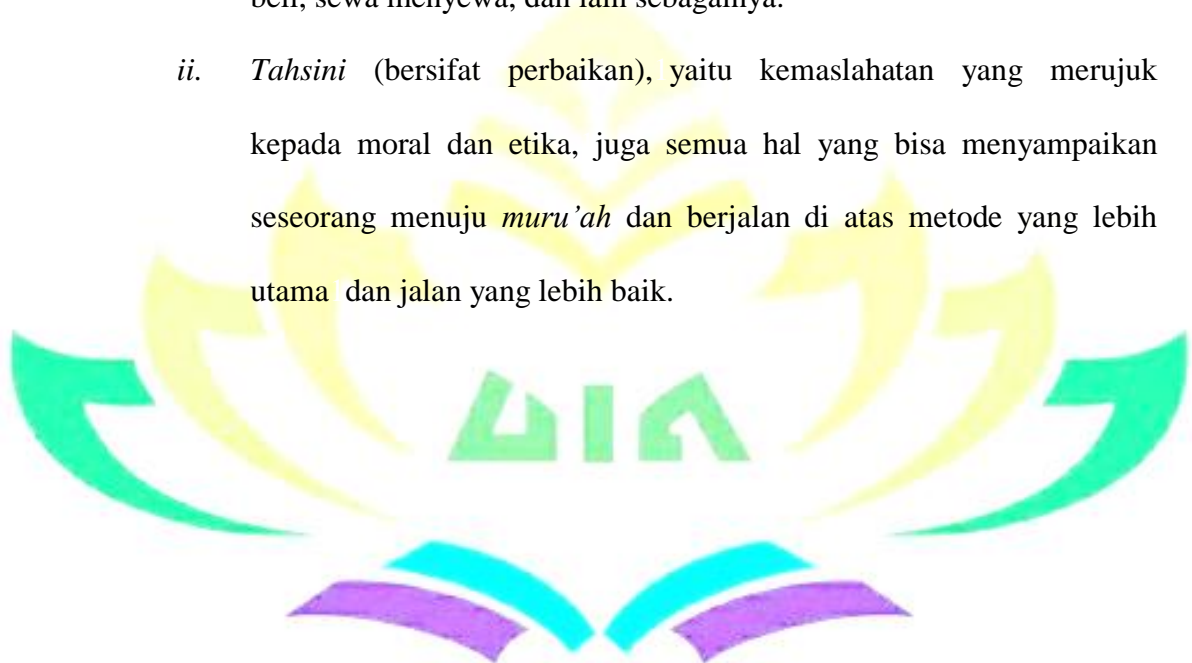
Apabila aspek kemaslahatan daruriyyah tidak terwujud, maka dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan di akhirat secara keseluruhan. Perlindungan ini juga dilakukan seperti saat darurat harus memakan bangkai, atau hal yang lain.

¹¹⁵ *Ibid.*, h.131.

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.408.

Adapun kemaslahatan yang kedua atau yang tidak inti dibagi menjadi dua antara lain:¹¹⁷

- i. *Hajji* (bersifat kebutuhan), ini merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka, contohnya seperti kegiatan jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya.
- ii. *Tahsini* (bersifat perbaikan), yaitu kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju *murū'ah* dan berjalan di atas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik.



¹¹⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h.xvi.

BAB III

PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PETASAN YANG MENGANDUNG BAHAN PELEDAK

A. Pandangan Hukum Positif tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak

1. Jual Beli Menurut Hukum Positif

Kegiatan ekonomi yang selama ini dilakukan masyarakat semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik berupa barang-barang maupun berupa jasa. Diantara semua kegiatan ekonomi jual beli adalah salah satunya. Menjual dan membeli adalah dua kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, apabila digabungkan keduanya maka berarti salah satu pihak menjual dan ada pihak lain yang membeli, hal disebut dengan perjanjian jual beli.¹¹⁸

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

“Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga benda yang telah diperjanjikan”.¹¹⁹

Unsur esensial (mendasar) dari perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus berupa uang. Apabila pembayaran atas penyerahan hak milik atas suatu barang

¹¹⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.133.

¹¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h.317.

tersebut tidak dengan uang, maka bukan perjanjian jual beli melainkan barter atau tukar menukar.¹²⁰

Berdasarkan Pasal 1475 KUHPerdara diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban, baik pihak penjual maupun pembeli, yaitu:¹²¹

- a. Kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang yang akan dijual kepada pembeli dan menjamin atau menanggung barang tersebut. Berdasarkan Pasal 1491 BW, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual, yaitu:¹²²
 - 1) Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram.
 - 2) Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian.
- b. Kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang akan dibeli kepada penjual.

Perjanjian sendiri adalah peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini maka akan timbul suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum ini dinamakan dengan perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa:

¹²⁰Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h.405.

¹²¹M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h181.

¹²²Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, h.145.

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”.¹²³

Ada dua pihak subjek dalam jual beli. Kedua belah pihak tersebut saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama adalah penjual dan pihak kedua disebut pembeli. Di dalam bahasa inggris jual beli hanya dicakup dalam satu kata yaitu *sale*.¹²⁴

Sedangkan benda yang menjadi objek dalam jual beli harus benda tertentu atau benda yang dapat ditentukan, baik wujudnya (bentuk), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda tersebut merupakan benda yang boleh di perdagangan. Di dalam kegiatan jual beli benda tertentu, calon pembeli diperbolehkan agar benda tersebut dicoba terlebih dahulu. Menurut Pasal 1463 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai benda yang biasa dicoba lebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan syarat yang tangguh. Misalnya perjanjian jual beli atas kendaraan bermotor dengan percobaan. Artinya sebelum pembeli menggunakan motor tersebut untuk dites dan menyetujuinya, maka perikatan tersebut belum lahir. Meskipun benda dan harga sudah disetujui, jual beli baru dianggap mengikat apabila benda yang sudah dicoba dan memuaskan.¹²⁵

¹²³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h.289.

¹²⁴ *Ibid.*, h.317.

¹²⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.62.

Suatu perjanjian mengenal beberapa asas yang penting untuk mencapai tujuan. Hal ini juga berlaku untuk kegiatan jual beli. Beberapa asas yang terdapat di dalam suatu perjanjian antara lain:

a. Asas konsensualisme

Asas ini memiliki arti bahwa suatu perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian mengenai pokok-pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian dikatakan mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum. Dengan kata lain perjanjian hanya cukup diucapkan dengan lisan saja.¹²⁶

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang dalam beberapa hal dalam perjanjian, antara lain kebebasan untuk:¹²⁷

- 1) Menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak
- 2) Menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
- 3) Menentukan isi atau klausula perjanjian
- 4) Menentukan bentuk perjanjian
- 5) Menentukan hukum yang akan digunakan, dan lain sebagainya.

¹²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h.296.

¹²⁷ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, h.9.

c. Asas mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*)

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu para pihak yang telah melakukan kontrak (perjanjian), maka dia sudah terikat untuk melakukan kontrak tersebut, itu dikarenakan kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi, dan janji tersebut telah mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.¹²⁸

d. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang di dalamnya dikatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Iktikad baik pada dasarnya menguasai para pihak pada periode pra perjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.¹²⁹

Kegiatan jual beli merupakan suatu perjanjian (kontrak). Perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.¹³⁰ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:¹³¹

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan kesepakatan

¹²⁸ *Ibid.*, h.11.

¹²⁹ *Ibid.*, h.12.

¹³⁰ Suharnoko, *Op.Cit.*, h.1.

¹³¹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, h.25.

ialah persesuaian kehendak antara para pihak yang melakukan perjanjian. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar terjadinya kesepakatan, antara lain:

- 1) Dengan cara tertulis
- 2) Dengan cara lisan
- 3) Dengan simbol-simbol tertentu (isyarat)
- 4) Dengan cara berdiam diri

Berdasarkan berbagai cara yang ada maka dapat dipahami bahwa terjadinya kesepakatan dapat dilakukan dengan tertulis maupun tidak tertulis. Yang mana kesepakatan tidak tertulis bisa dilakukan dengan cara lisan, simbol-simbol tertentu atau dengan berdiam diri. Sedangkan kesepakatan yang dilakukan dengan cara tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Adapun akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti notaris dan PPAT. Sebaliknya akta autentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.¹³²

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perjanjian).

¹³² *Ibid.*, h.28.

Dalam melakukan perjanjian para pihak harus cakap. Cakap disini adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian).¹³³ Seseorang dianggap tidak cakap hukum apabila:

- 1) Belum berusia 21 tahun dan belum menikah
- 2) Berusia 21 tahun tapi gelap mata, sakit ingatan, dungu, atau boros.

Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang; dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹³⁴

c. Objek

Dalam melakukan suatu perjanjian objeknya harus jelas dan telah ditentukan oleh para pihak, adapun objek tersebut bisa berupa barang maupun jasa, dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu.¹³⁵

¹³³ *Ibid.*, h.42.

¹³⁴ *Ibid.*, h.43.

¹³⁵ *Ibid.*

Hal ini disebut juga dengan prestasi, prestasi adalah objek dari perjanjian.¹³⁶ Prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan atau melakukan sesuatu, seperti membayar harga dan menyerahkan barang.
- 2) Berbuat sesuatu (keahlian atau tenaga), seperti memperbaiki sebuah barang yang rusak, membangun rumah, dan melukis suatu lukisan yang sudah dipesan.
- 3) Tidak berbuat sesuatu, cara pelaksanaannya dengan bersikap pasif, misalnya perjanjian tidak mendirikan suatu bangunan, atau perjanjian untuk tidak menggunakan merk dagang tertentu.¹³⁷

Adapun sifat dari prestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Misalkan jenis, warna dan lain sebagainya.
- 2) Prestasi itu harus mungkin. Artinya prestasi dapat dipenuhi oleh debitor (penjual).
- 3) Prestasi itu harus diperbolehkan (halal). Dalam hal ini berarti prestasi tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.

¹³⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1993), h.201.

¹³⁷Ahmad Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.69.

4) Prestasi itu harus memiliki manfaat. Artinya pembeli (kreditor) dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya.¹³⁸

d. Suatu sebab yang halal (tidak terlarang).

Kata halal disini bukanlah lawan dari kata haram dalam hukum islam, tapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan kepentingan umum.¹³⁹

2. Pandangan hukum positif tentang jual beli petasan

Hukum dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang dibuat untuk ketertiban dalam arti luas. Secara teoritis dan filosofis tujuan hukum dapat dirumuskan untuk kedamaian hidup bersama. Adapun masalah kedamaian tersebut mencakup dua hal, yaitu:¹⁴⁰

- a. Ketertiban, dalam hal ini menyangkut bidang eksternal dari manusia.
- b. Ketenangan, dalam hal ini menyangkut bidang internal dari manusia.

Masalah petasan sudah menjadi hal yang lama di perbincangkan. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Petasan atau mercon merupakan suatu benda, berdaya ledak rendah (*low explosive*), dimana bubuk yang digunakan sebagai bahan pembuat petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu. Petasan sudah

¹³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, h.241.

¹³⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, h.45.

¹⁴⁰ Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.58.

menjadi hal yang biasa digunakan dalam berbagai tradisi seperti perayaan pernikahan, menyambut tahun baru, hari raya idhul fitri dan lain sebagainya.¹⁴¹

Dari beberapa orang aparat penegak hukum dan masyarakat yang Tina Asmarawati wawancarai dalam bukunya yang berjudul “sosiologi hukum petasan ditinjau dari perspektif hukum dan kebudayaan” di daerah Tangerang dan Jakarta serta Bekasi orang yang membawa atau membeli petasan untuk perayaan suatu perkawinan atau sunatan tidak atau belum ada yang dihukum. Alasan mereka petasan suatu kebiasaan dan kebudayaan mereka untuk upacara adat mereka, mengexpresikan kegembiraan kedalam suatu perlombaan seperti baru baru ini lomba beduk. Perayaan berakhirnya bulan syawal dan lain-lainya. Hal tersebut bukan suatu kesalahan atau tindak pidana, menurut mereka jadi tidak perlu diberi hukuman.

Beberapa pedagang petasan mengatakan mereka berjualan petasan untuk perayaan perkawinan, sunatan dan lain-lain, mereka belum pernah dihukum, biasanya jika ada razia petasan itu malam takbiran. Demikian pula pendapat yang serupa dari beberapa penegak hukum. Didalam peraturan juga dikatakan bahwa petasan kecil ukurannya tidak melebihi panjangnya 2 inci sepanjang untuk suatu upacara atau tradisi diperbolehkan.

Apabila hal ini dikaitkan dengan pertanggung jawaban, sebagai dasar dari hukum pidana dalam praktek bahkan ditambahkan bahwa pertanggung jawab pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan tersebut. Secara lengkap asas ini adalah ”*actus non facit*

¹⁴¹ *Ibid*, h.135.

reum, nisi mens sit rea". *Actus reus* berarti perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, yang harus dilengkapi dengan *mens rea* yang dibuktikan dengan penuntutan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea* yaitu dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Secara keseluruhan artinya adalah sesuatu perbuatan tidak dapat dinyatakan orang itu bersalah kecuali bila dilakukan kejahatan yang dapat dipertanggung jawabkan. *Asas Noella poena sine pravia lege*. Tidak ada seorang pun dapat dihukum tanpa adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Sebagaimana kasus petasan sebagaimana yang diuraikan di halaman muka. Selama tidak ada korban dan sesuai dengan peraturan yang ada.¹⁴²

Pada dasarnya petasan dilarang karna dapat menimbulkan suatu ledakan, tidak jarang ledakan akibat petasan menimbulkan marabahaya, baik bagi barang, harta, bahkan bagi jiwa orang lain. Banyak kasus yang terjadi akibat ledakan yang ditimbulkan oleh petasan, terutama saat bulan ramadhan tiba. Sehingga terdapat peraturan terkait dengan petasan, karena masalah yang ditimbulkan merupakan salah satu pelanggaran tindak pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dibuat untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹⁴² Tina Asmarawati, *Op.Cit.*, h.145.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁴³

Pengertian hukum pidana menurut Van Hattum adalah suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan yang telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.¹⁴⁴

Kegiatan jual beli petasan tidak diperbolehkan oleh Negara. Sejak zaman Belanda petasan sudah dilarang, adapun peraturan tentang petasan terdapat dalam Lembaran Negara (LN) tahun 1940 Nomor 41 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bunga Api 1939. Dimana diantara lain adanya ancaman pidana kurungan tiga bulan dan denda Rp. 7.500 apabila melanggar ketentuan “membuat, menjual, menyimpan, mengangkut bunga api dan petasan yang tidak sesuai standar pembuatan”.¹⁴⁵

Karena peraturan tersebut sudah cukup lama, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan baru tentang bahan peledak atau petasan, diantaranya adalah UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Starfbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang terdahulu Nomor 8 tahun 1948. UU Darurat 1951 yang telah diubah menjadi

¹⁴³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h.1.

¹⁴⁴ M. ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.1.

¹⁴⁵ Tina Asmarawati, *Op.Cit.*, h.144.

UU No. 12/DRT/1951 terdiri atas 6 pasal, yang ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara atau hukuman mati.

Peraturan tentang bahan peledak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi:

- 4) Barangsiapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.¹⁴⁶

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa para pembuat, penjual, pembeli, penyimpan, dan pengangkut bahan peledak dengan kata lain petasan bisa dikenai dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Peraturan lain tentang petasan juga diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir, dihukum:

1. Penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;
2. Penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain;
3. Penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang yang mati akibat perbuatan itu.¹⁴⁷

¹⁴⁶ *Ibid.*, h.146.

¹⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1996), h.153.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa segala kegiatan yang berhubungan dengan bahan peledak atau petasan yang dapat menimbulkan letusan atau ledakan dianggap berbahaya serta mengganggu lingkungan masyarakat dilarang untuk diperjualbelikan dan dipergunakan.

B. Pandangan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan

Secara umum kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi suatu barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Ruang lingkup ekonomi sendiri meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan masalah konsumsi, produksi dan distribusi.

Ekonomi Islam berdiri diatas prinsip perdagangan berdasarkan dengan syari'at, yaitu perdagangan dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang telah dihalalkan oleh Allah SWT yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan muamalah.¹⁴⁸

Islam memandang kegiatan (aktivitas) ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi, maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Hukum jual beli adalah jaiz atau mubah (boleh). Adapun dasar hukum diperbolehkannya muamalah atau jual beli adalah Q.S An-Nisa ayat 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

¹⁴⁸ Ahmad bin ‘Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2005, h.4.

Berbagai jenis muamalah diperbolehkan selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya. Dalam hukum Islam kegiatan jual beli petasan tidak dilarang, artinya tidak ada ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai larangan tentang jual beli petasan. Jual beli petasan menjadi tidak diperbolehkan atau dilarang karena hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan jual beli petasan terdapat unsur *tabdzir* (menghamburkan harta). Harta sendiri merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.¹⁴⁹ Menghamburkan harta atau pemboros tidak diperbolehkan karena melanggar salah satu syarat sahnya orang yang melakukan akad jual beli. Bagi orang-orang pemboros apabila melakukan jual beli, maka jual beli dianggap tidak sah.

Menghamburkan harta juga tidak diperbolehkan karena bertolak belakang dengan *maqashid asy-syariah*, yaitu *Hifdz Al-Mal* (menjaga harta). Secara *lughawi maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, hal ini dapat diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Asy-Syatibi menulis tujuan *syariat* sebagai berikut:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ ... وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ
مَصَالِحِهِمْ فِي دِينٍ وَالدُّنْيَا

¹⁴⁹Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h.167.

“Sesungguhnya syari’ah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”¹⁵⁰

Dalam *maqashid syari’ah* terdapat lima unsur, yaitu:¹⁵¹

1. Memelihara agama (دِينٌ)
2. Memelihara jiwa (نَفْسٌ)
3. Memelihara akal (عَقْلٌ)
4. Memelihara keturunan (نَسْلٌ)
5. Memelihara harta benda (مَالٌ)

Kegiatan jual beli petasan merupakan salah satu bentuk pemborosan terhadap harta benda. Padahal Allah melarang memboroskan harta dalam kebodohan, karena harta adalah sumber kekuatan hidup.¹⁵²

Adapun ayat al-Qur’an yang melarang mengenai hal ini terdapat dalam Q.S Al-Isra’ ayat 26-27 yang berbunyi:

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلرَّبِّ ڪُفُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah

¹⁵⁰Muhamad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), h.196.

¹⁵¹Khairul Umam & Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.128.

¹⁵² Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h.173.

Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”¹⁵³ (QS. Al-Isra’ : 26-27)

2. Dalam petasan mengandung unsur *dharar* (bahaya). Membakar atau menyalakan petasan dapat menimbulkan bunyi ledakan yang dianggap mengganggu dan berbahaya baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ledakan yang ditimbulkan akibat petasan tidak jarang menyebabkan orang lain terluka bahkan sampai meninggal dunia. Hal ini juga bertentangan dengan *maqashid syariah* yaitu *Hifdz An-Nafs* (menjaga jiwa). Agama Islam melarang sesuatu yang menimbulkan bahaya bagi jiwa diri sendiri maupun jiwa orang lain, jiwa setiap manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara dan dijaga dan menjauhkannya dari sumber-sumber kerusakan.¹⁵⁴ Adapun larangan mengenai hal ini terdapat dalam Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.¹⁵⁵

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁵³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.388.

¹⁵⁴ Ahmad Al-Musri Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h.23.

¹⁵⁵ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h.37.

Artinya: “...dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵⁶ (QS. An-Nisa: 29)

Dari 2 ayat diatas sudah dijelaskan bahwa Allah SWT melarang segala perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa setiap manusia. Karna pada dasarnya hak pertama dan yang paling utama yang diperhatikan dalam Islam adalah hak hidup, hak ini merupakan hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.¹⁵⁷

3. Di dalam syarat sahnya jual beli, mengenai barang yang diperjualbelikan salah satunya adalah barang yang dijadikan objek jual beli dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.¹⁵⁸ Tetapi faktanya menyalakan atau membakar petasan lebih banyak menghasilkan mudharatnya (bahaya) daripada manfaatnya.

Pada dasarnya tujuan syariah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pengertian maslahah sendiri dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia, dalam kata lain adalah setiap perbuatan yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.¹⁵⁹ Adapun kaidah fiqh mengenai kemudharatan yaitu sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

¹⁵⁶ *Ibid.*, h.107.

¹⁵⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h.22.

¹⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.118.

¹⁵⁹ Muhammad Amin Suma, *Op.Cit.*, h.200.

“Kemudharatan harus di hilangkan”.¹⁶⁰

Menurut al-Khusyani *lafadzal-dharar* berarti sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seseorang tapi membawa bahaya bagi orang lain, dengan kata lain kaidah ini mempunyai arti bahwa seluruh hal yang menimbulkan bahaya harus di lenyapkan atau di hilangkan.¹⁶¹ Allah SWT berfirman dalam QS. al-A’raf ayat 56, yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ...

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi...”¹⁶²

Dan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ (رواه مالك)

Artinya: “Tidak boleh memberi mudharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan dalam Islam”.¹⁶³ (HR. Malik)

Berdasarkan larangan-larangan di atas menjadikan petasan sebagai benda yang haram, karna pada dasarnya larangan sendiri menunjukkan makna haram. Sehubungan dengan haramnya menyalakan atau membakar petasan, maka haram pula membuat dan memperjualbelikannya.

Jual beli dan menyalakan petasan dianggap memberikan mudharat bagi diri sendiri maupun orang lain, selain sebagai suatu kegiatan

¹⁶⁰Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h.5.

¹⁶¹Agus Hermanto dan Rohmiyuhani'ah, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books, 2017), h.161.

¹⁶² Departemen Agama, *Op.Cit.*, h.212.

¹⁶³ Agus Hermanto dan Rohmiyuhani'ah, *Op.Cit.*, h.162.

pemborosan, suara bising yang ditimbulkan dari ledakan petasan sangat mengganggu lingkungan masyarakat, tidak jarang ada yang celaka bahkan sampai meninggal dunia akibat ledakan yang ditimbulkan dari petasan. Tindak pidana seperti ini bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga harta benda dan menjaga jiwa. Sedangkan hukuman atau sanksi yang diberikan berupa hukuman *ta'zir*, sebab belum adanya ketentuan yang jelas di dalam Al-qur'an dan Hadist, dimana hukuman yang diberikan diserahkan sepenuhnya kepada Hakim atau penguasa.

Ta'zir sendiri menurut bahasa ialah kata dasar dari *azzara'* yang memiliki arti menolak dan mencegah kejahatan, yang berarti juga menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* berarti juga memberi hukuman yang berupa pelajaran.¹⁶⁴

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang hukumannya belum ada atau belum ditentukan oleh *syara'*, hukuman diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) untuk menetapkan. Hukuman *ta'zir* yang diberikan berbeda, hal ini tergantung kepada kondisi dan perbuatan yang dilakukan. Mulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat.¹⁶⁵

Penerapan hukuman yang diberikan harus sesuai dengan syari'at Islam. Karena diantara semua sumber-sumber hukum diatas, hanya Al-qur'an dan hadist yang berisi aturan-aturan pokok yang bersifat umum.

¹⁶⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.164.

¹⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.254.

Sedangkan sumber-sumber hukum lainnya merupakan perluasan dari kedua sumber pokok tersebut. Keragaman sumber hukum yang ada di dasarkan pada firman Allah dalam Q.S An-nissa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹⁶⁶

¹⁶⁶ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h.114.

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah mengumpulkan data-data yang bersifat kepustakaan baik yang diperoleh dari kitab-kitab aslinya maupun kitab-kitab terjemahan dan buku-buku yang berkaitan dengan judul karya tulis ini yaitu tentang “analisis hukum positif dan hukum Islam tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak”, yang kemudian dituangkan dalam menyusun pada bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah selanjutnya akan menganalisis data yang telah dikumpulkan itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

A. Ketentuan Sanksi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak

1. Sanksi dalam Hukum Positif tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak

Menjual dan membeli adalah dua kata yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, apabila digabungkan keduanya maka berarti salah satu pihak menjual dan ada pihak lain yang membeli, hal disebut dengan perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga benda yang telah diperjanjikan.

Kegiatan yang berhubungan dengan bahan peledak di Indonesia tidak diperbolehkan. Karna petasan merupakan salah satu dari bahan peledak yang memiliki daya ledak rendah (*low explosive*), maka petasan tidak

diperbolehkan. Pengertian petasan sendiri adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam penggunaannya, fungsi petasan digunakan untuk memeriahkan berbagai peristiwa, seperti perayaan tahun baru, lebaran, perkawinan, dan sebagainya.

Peraturan mengenai jual beli petasan yang mengandung bahan peledak diatur dalam UU No. 12/DRT/1951, yang ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara atau hukuman mati. Peraturan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi:

Barangsiapa, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Dalam pasal tersebut sudah cukup dijelaskan, bahwa siapa saja yang melakukan aktifitas yang berhubungan dengan bahan peledak, dalam hal ini termasuk petasan, akan dikenai hukuman, yaitu hukuman mati atau setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Meskipun UU tersebut terbilang sudah cukup lama, tetapi UU tersebut masih berlaku dan masih dipergunakan sampai saat ini.

Hukuman yang dijanjikan dalam UU tersebut terbilang cukup berat. Namun dalam pelaksanaannya proses penegakkan dalam UU No. 12/DRT/1951 tersebut. Kendala yang utama adalah belum dipahami oleh masyarakat apa saja bahaya yang dapat ditimbulkan dari kegiatan jual beli petasan tersebut.

Selain itu bagi penjual, menjual petasan dianggap sebagai kegiatan jual beli yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar pada hari-hari tertentu, seperti pada saat malam pergantian tahun. Demikian juga bagi pembeli, membeli dan menyalakan petasan dianggap sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan dan harus dilakukan dalam menyambut hari-hari tertentu, seperti menyambut malam pergantian tahun, mereka melakukan itu semua tanpa berfikir bahaya apa saja yang akan ditimbulkan akibat ledakan dari petasan tersebut.

Meskipun hal ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi belum berjalan secara optimal. Karena pada kenyataannya masih banyak yang melakukan kegiatan jual beli petasan tersebut.

Mengenai masalah petasan ini tentu dibutuhkan aturan hukum yang bersifat komperhensif dan integral, aparat penegak hukum harus bersikap tegas dan berwibawa, dan pembuat kebijakan baik tataran perundangan maupun keputusan hukum harus dapat bekerja sesuai tujuan hukum itu sendiri, yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Ketentuan Sanksi dalam Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak

Kegiatan jual beli atau muamalah pada dasarnya diperbolehkan (mubah), asalkan memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli ada tiga, yaitu akad, pelaku transaksi, dan objek transaksi.

Dalam jual beli petasan ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu mengenai pelaku transaksi (dalam hal ini adalah pembeli), salah satu syarat bagi orang yang melakukan akad adalah tidak pemboros. Bagi orang-orang pemboros apabila melakukan suatu akad jual beli maka dianggap tidak sah. Sedangkan kegiatan membeli petasan adalah suatu bentuk pemborosan terhadap harta (*tabdzir*). Hal ini juga bertentangan dengan tujuan dibentuknya syariat (*maqashid asy-syariah*). Mengenai pemborosan sudah dijelaskan dalam QS.Al-Isyrah:26-27, yang artinya: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Selanjutnya benda yang dijadikan objek dalam jual beli. Salah satu syarat yang harus ada mengenai benda yang diperjualbelikan adalah benda tersebut memberi manfaat menurut syara'. Melihat kejadian-kejadian yang ada mengenai petasan, dapat dilihat bahwa dalam petasan mempunyai lebih besar mudharat dari manfaatnya, mudharat disini dartikan dengan bahaya. Petasan mengandung bubuk peledak yang apabila dibakar akan menimbulkan ledakan yang dianggap berbahaya, baik bagi barang, jiwa ataupun yang lainnya. Padahal Allah SWT melarang suatu umat berbuat

kerusakan di muka bumi. Larangan ini terdapat dalam QS. al-A'raf:56, yang artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”.

Dengan adanya larangan-larangan yang sudah dijelaskan menjadikan petasan sebagai benda yang dilarang (haram). Dengan demikian haram juga untuk membakar, memperjualbelikan dan sebagainya.

Kegiatan jual beli petasan yang sudah dijelaskan diatas merupakan suatu tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan *maqasid al-syariah*. Sanksi atau hukuman yang diberikan berupa hukuman *ta'zir*, karena belum adanya ketentuan yang jelas didalam al-Qur'an dan hadist. Mengenai bagaimana bentuk dan ukuran, keputusannya diserahkan kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang.

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai perbuatan pidana apabila mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut diharamkan atau dilarang oleh syari'at.
- b. Hal ini sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Isra' ayat 27. Bahwa jual beli petasan mengandung unsur pemborosan dan pemborosan tidak diperbolehkan dalam Islam.
- c. Perbuatan tersebut berbahaya bagi keselamatan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

Selain pemborosan terhadap harta benda, petasan juga dapat mengganggu keselamatan jiwa. Padahal Islam melarang perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan baik jiwa diri sendiri maupun jiwa orang lain. Larangan ini terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195, yang

artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

d. Syarat sahnya dalam jual beli tidak terpenuhi.

Yaitu syarat sahnya objek yang diperjualbelikan harus memberi manfaat, tetapi petasan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat.

Dalam Islam larangan-larangan yang dibuat bertujuan untuk melindungi tatanan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaan, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya.

Mengenai pandangan hukum positif dan hukum Islam serta sanksi yang diberikan tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak, maka sudah terlihat jelas bahwa hukum positif dan hukum Islam melarang kegiatan jual beli, dan membakar petasan karena dianggap akan membawa mudharat (bahaya) bagi umat manusia.

Kemudian mengenai sanksi yang diberikan dalam hukum positif dan hukum Islam, sudah terlihat jelas bahwa diantara kedua hukum tersebut, baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam keduanya saling menjatuhkan hukuman, akan tetapi hukum positif terlihat lebih menjatuhkan hukuman yang dijadikan sebagai pelajaran dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kegiatan jual beli petasan.

Alasannya karena dalam hukum positif sudah dijelaskan secara terang-terangan bagaimana hukuman untuk masalah yang ada, sedangkan dalam hukum Islam belum adanya ketentuan hukum dalam al-Qur'an maupun hadist.

Dari penjelasan kesimpulan yang ada dapat terlihat bahwa semua hukum yang ada, baik hukum positif maupun hukum Islam keduanya saling melengkapi. Akan tetapi penerapan keduanya belum sepenuhnya dilakukan, harus adanya penerapan yang tegas mengenai hal ini sehingga tujuan hukum itu sendiri, yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

B. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak

Masalah diatas sudah jelas ada hukum yang mengaturnya. Baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Kedua hukum tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Persamaan yang ada dalam masalah tersebut adalah di antara hukum positif dan hukum Islam sama-sama melarang kegiatan jual beli petasan karena ledakan yang ditimbulkan dianggap berbahaya dan dapat mengganggu ketenangan masyarakat, keselamatan jiwa dan harta.

Perbedaan dalam masalah tersebut adalah sanksi yang diberikan dalam hukum positif dan hukum Islam. Di dalam hukum positif sanksi sudah

dijelaskan dalam UU No. 12/DRT/1951 mengenai bahan peledak dengan kata lain petasan bisa dikenai sanksi berupa hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Sedangkan di dalam hukum Islam sanksi yang diberikan yaitu berupa hukuman *ta'zir*, karena belum adanya ketentuan dalam al-Qur'an dan hadist, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan terhadap ijtihad hakim atau imam yang berwenang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, dapatlah diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Sanksi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak

- a. Ketentuan Sanksi dalam Hukum Positif tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak

Di dalam hukum positif kegiatan jual beli petasan sudah jelas dilarang karena dapat menimbulkan suatu ledakan yang dianggap berbahaya bagi barang, harta, bahkan jiwa.

Ketentuan Sanksi dalam hukum positif tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak diatur dalam UU No. 12/DRT/1951 tentang Bahan Peledak dikenakan sanksi berupa hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

- b. Ketentuan Sanksi dalam Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak

Hukum Islam memandang kegiatan jual beli petasan sebagai suatu bentuk pemborosan, petasan juga dianggap sebagai benda yang dilarang

karena dalam petasan mengandung bubuk peledak yang dapat menimbulkan bahaya (mudharat).

Ketentuan Sanksi dalam hukum Islam tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak. Hukuman yang diberikan berupa hukuman *ta'zir*, karena belum adanya ketentuan dalam Al-qur'an dan Hadist, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan terhadap ijtihad hakim atau imam yang berwenang.

2. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Jual Beli Petasan yang Mengandung Bahan Peledak

Adapun Persamaan dan perbedaan dari masalah diatas menurut hukum positif dan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan antara hukum positif dan hukum Islam adalah sama-sama melarang kegiatan jual beli petasan yang mengandung bahan peledak yang dianggap berbahaya.
- b. Perbedaan menurut hukum positif dan hukum Islam yaitu mengenai sanksi atau hukuman yang diberikan.

3. Saran

Harus adanya kesadaran dan penanggulangan hukum kepada pihak-pihak:

1. Kepada pihak penjual petasan hendaklah meninggalkan bisnis jual beli petasan, karena dianggap sebagai benda berbahaya dan sudah jelas dilarang.
2. Kepada pihak pembeli hendaknya tidak melakukan pemborosan dengan membeli petasan yang mengandung bahan peledak, selain bunyi bising

yang dapat mengganggu, ledakan yang ditimbulkan juga berbahaya bagi keselamatan jiwa.

3. Kepada pihak pemerintah dan aparat penegak hukum sebaiknya menindak tegas mengenai kegiatan jual beli petasan yang mengandung bahan peledak.



DAFTAR PUSTAKA

- ad-Duwaisy, Ahmad bin Abdurrazzaq. *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*, Jawa Barat: PT Media Utama, 2016.
- Ali, Mohamad Daud. *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdulah al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Asmarawati, Tina. *Sosiologi Hukum Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prena Media, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hermanto, Agus, Rohmiyuhani'ah. *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Lintang Raksi Aksara Books, 2017.

Isa Fatoni Hidayat, Tindakan Kolektif Perlawanan Pembuat Petasan Terhadap Aturan Hukum di Kampung Petasan Kabupaten Jombang, dalam jurnal *Idea Societa*, Vol.3, 2014.

Jauhar, Ahmad Al-Musri Husain. *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2013.

Ja'far, Khumedi A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1986.

Kautur, Ranny. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2000.

Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: CV Rajawali Pers, 1993.

Lubis, Suhrawardi, K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Miru, Ahmadi. Pati, Sakka. *Hukum Perikatan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinek Cipta, 2015.

Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia, 2012.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.

Sahrani, Sohari, Abdullah, Ru'fan. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Salim Segaf al-Jufrie, Miftah Faridl. *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1996.

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Syaiful Mudawam, Syari'ah-Fiqih-Hukum Islam, dalam jurnal *Asy-Syir'ah* Vol.46.

Umam Khairul, Aminudin Ahyar. *Ushul Fiqih II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Washil, Nashr Farid Muhammad, Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Qawa'id Fiqhiyah*, Jakarta: AMZAH, 2013.

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Website:

Eka Nuraini Rachmawati, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Vol. XII, No. 4 (Online), tersedia di: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah> (Desember 2015), h. 2.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_positif, diakses pada tanggal 13 mei 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_peledak, diakses pada 12 September 2018.

